

Gender Equality, Disability and Social Inclusion Approach to Disaster Management Policy: The Case of the Bali Disaster Response Authority

JISPO
Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
2023, Vol. 13, No. 2: 169-192
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
© The Author(s) 2023

I Putu Dedy Rimbawan*

Universitas Bali Internasional, Indonesia

Anik Nurhaeni

Universitas Bali Internasional, Indonesia

Abstract

This article describes the application of the GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) approach to disaster management policies with special reference to the Province of Bali. The province, which frequently experiences natural disasters such as earthquakes, volcanic eruptions and floods, recognizes the need to pay attention to gender differences, disabilities and social inclusion in all aspects of disaster management. The GEDSI approach promotes active participation and an equal role for all community members in dealing with disasters. The findings show that Bali is committed to ensuring equal access to information, protection and disaster management services for vulnerable groups. It seeks to integrate a gender perspective in disaster management planning, including ensuring women's participation in decision-making and their involvement in policy implementation. In addition, the GEDSI approach also emphasizes social inclusion and the needs of people with disabilities. Bali seeks to remove physical and social barriers that may impede the participation and accessibility of persons with disabilities during disasters. Disabled persons-friendly facilities and services are provided, and disability groups are involved in policy planning and evaluation. With the GEDSI approach, disaster management in Bali can be inclusive and responsive to the needs of all individuals. This approach will ensure equity, respect human rights and enhance sustainability in the face of natural disasters.

Key Words

GEDSI approach, gender equality, disability, social inclusion, disaster management policy, Bali

*Corresponding author:

I Putu Dedy Rimbawan

Alamat: Lingk. Puseh Pengalasan Sading, Mengwi, Badung, Bali

Email: dedyrimbawan@iikmpbali.ac.id

Abstrak

Artikel mendeskripsikan penerapan pendekatan GEDSI dalam kebijakan Pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dalam kebijakan manajemen bencana dengan fokus Provinsi Bali. Provinsi ini, yang sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi dan banjir, mengakui kebutuhan untuk memperhatikan perbedaan gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam semua aspek manajemen bencana. Pendekatan GEDSI mempromosikan partisipasi aktif dan peran yang sama bagi semua anggota komunitas dalam menangani bencana. Temuan kami menunjukkan bahwa Bali berkomitmen untuk memastikan akses yang sama terhadap informasi, perlindungan dan layanan manajemen bencana bagi kelompok-kelompok yang rentan. Ini bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan manajemen bencana, termasuk memastikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan. Selain itu, pendekatan GEDSI juga menekankan inklusi sosial dan kebutuhan orang-orang dengan disabilitas. Bali bertujuan untuk menghilangkan hambatan fisik dan sosial yang dapat menghalangi partisipasi dan aksesibilitas orang-orang cacat selama bencana. Fasilitas dan layanan yang ramah orang cacat disediakan, dan kelompok cacat terlibat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Dengan pendekatan GEDSI, manajemen bencana di Bali menjadi inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua individu. Pendekatan ini akan memastikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan meningkatkan keberlanjutan dalam menghadapi bencana alam.

Kata-kata Kunci

Pendekatan GEDSI, kesetaraan gender, disabilitas, inklusi sosial, kebijakan manajemen bencana, Bali

Pendahuluan

Kebijakan penanggulangan bencana yang inklusif dan berkeadilan merupakan kunci dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di Provinsi Bali. Dalam upaya mencapai tujuan ini, pendekatan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) telah menjadi landasan utama dalam kebijakan penanggulangan bencana di provinsi ini. Pendekatan ini mengakui pentingnya memperhatikan perbedaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam setiap aspek penanggulangan bencana. Provinsi Bali, yang terkenal dengan keindahan alamnya, memiliki risiko yang tinggi dari bencana seperti gempa bumi, kebakaran, kekeringan,

letusan gunung, dan banjir. Sesuai dengan data bencana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali pada Tahun 2023 pada Tabel 1, ditemukan bencana yang paling sering terjadi adalah bencana hidrometeorologi, yang terjadi sebagai besar diakibatkan karena kondisi cuaca dan iklim dengan berbagai parameter seperti curah hujan, kelembaban, temperatur dan angin.

Sesuai dengan parameter tersebut, pada musim penghujan, khususnya akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023, bencana yang terjadi sangat berdampak pada aktivitas sosial masyarakat seperti bekerja, bersekolah, dan berdagang. Di pertengahan tahun, memasuki musim kemarau, jumlah bencana kebakaran semakin banyak (Tabel 1). Hal ini meningkatkan aktivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana terbagi atas pelaksanaan program kegiatan, yaitu tahap pra bencana dengan penguatan kesiapsiagaan, mitigasi hingga pengurangan risiko bencana, tahap saat bencana dengan pelaksanaan respon bencana dan rehabilitasi, dan tahap pasca bencana yang dilaksanakan penguatan rekonstruksi dari dampak bencana yang terjadi. Untuk itu, aktivitas yang dilaksanakan tidak terlepas pada pelayanan terhadap masyarakat untuk menciptakan keamanan dan keselamatan sesuai dengan visi dan misi Provinsi Bali yang mengedepankan pelayanan publik yang berkeadilan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender, disabilitas serta Inklusi Sosial (Bali 2023).

Dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana, pendekatan GEDSI berfungsi sebagai kerangka kerja yang melibatkan perempuan, laki-laki, anak-anak, dan orang dengan disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana (Kurzman et al. 2019). Kesetaraan gender merupakan salah satu komponen penting dari pendekatan GEDSI. Hal ini melibatkan pemerataan partisipasi, peran, dan akses perempuan dalam penanggulangan bencana. Provinsi Bali telah mengadopsi kebijakan yang memastikan peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana, serta memperhatikan kebutuhan dan kerentanan khusus yang dihadapi oleh perempuan selama bencana (Marzuki 2017). Selain itu, pendekatan GEDSI juga mempertimbangkan inklusi sosial dan keberlanjutan dalam kebijakan penanggulangan bencana. Provinsi Bali berkomitmen untuk menciptakan aksesibilitas fisik dan sosial bagi orang dengan disabilitas selama bencana, termasuk fasilitas yang ramah disabilitas dan pendekatan partisipatif yang melibatkan kelompok advokasi disabilitas. Dalam konteks ini, pendekatan GEDSI berfungsi sebagai jembatan untuk

memastikan bahwa kebutuhan dan hak semua individu, termasuk orang dengan disabilitas, diperhatikan dengan baik, khususnya dalam penanggulangan bencana.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan pendekatan GEDSI dalam kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Bali, mengeksplorasi langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan terkait, dan menganalisis dampak dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini. Artikel ini juga akan mengevaluasi keberhasilan pendekatan GEDSI dalam meningkatkan responsifitas, kesetaraan, dan keberlanjutan dalam penanggulangan bencana di Provinsi Bali. Harapannya, artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang implementasi pendekatan GEDSI dalam penanggulangan bencana di Provinsi Bali dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, dapat ditingkatkan kapasitas penanggulangan bencana yang inklusif dan berkeadilan, sehingga meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di Provinsi Bali. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, artikel ini menggunakan data primer dari hasil observasi, wawancara yang mendalam terhadap pendekatan GEDSI yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, serta informasi sekunder dari berbagai sumber. Hal ini dimaksudkan untuk memahami pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dengan proyeksi pendekatan GEDSI. Informan yang terlibat adalah pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, sejumlah organisasi inklusi dan disabilitas yang tergabung dalam wadah forum pengurangan risiko bencana di Provinsi Bali, dan warga masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan dalam memberikan informasi yang objektif pada pelaksanaan program penanggulangan bencana.

Artikel ini menjelaskan alasan-alasan penting mengkaji pendekatan GEDSI dalam kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Bali. Pertama, mengurangi ketimpangan dan kerentanan yang ada dalam respon terhadap bencana; dengan memperhatikan dimensi gender, disabilitas, dan inklusi sosial, kebijakan dapat dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan dan perlindungan yang lebih baik bagi kelompok yang rentan. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan khusus yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Bali; melalui pendekatan GEDSI, kebijakan dapat mengintegrasikan perspektif gender yang memperhatikan peran perempuan, serta memastikan aksesibilitas fisik dan

komunikasi bagi orang dengan disabilitas. Ketiga, mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif semua individu dalam penanggulangan bencana di Provinsi Bali; dengan mengadopsi pendekatan GEDSI, kebijakan penanggulangan bencana dapat menciptakan lingkungan inklusif yang mempromosikan partisipasi semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan orang dengan disabilitas. Keempat, meningkatkan efektivitas respons bencana di Provinsi Bali; dengan memperhatikan faktor-faktor GEDSI dalam perencanaan dan implementasi kebijakan, penanggulangan bencana dapat menjadi lebih responsif dan relevan terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang rentan. Terakhir, memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dalam penanggulangan bencana sehingga mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana (Saputra and Nugroho 2021).

Kajian-kajian terdahulu telah banyak membahas terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pandangan perempuan Bali. Frich (2020) menemukan bahwa implementasi hak penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, masih belum memadai karena program dan kegiatan untuk penyandang disabilitas masih kurang serta masih adanya stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas di masyarakat. Perlu adanya regulasi dari pemerintah yang mengatur dan melindungi hak penyandang disabilitas. Artikel serupa dilakukan oleh Pramudiana (2017) yang membahas tentang kebijakan pemerintah di bidang pendidikan inklusi untuk anak-anak disabilitas di Surabaya yang masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan untuk memastikan akses yang sama terhadap pendidikan bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki disabilitas masih terdapat keterbatasan infrastruktur dan kondisi keuangan yang menghambat implementasi pendidikan inklusi. Jumlah sekolah inklusi yang masih sedikit dan jumlah guru yang terlatih untuk menghadapi siswa dengan disabilitas juga menjadi masalah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dan implementasi kebijakan pendidikan inklusi yang efektif untuk memastikan akses yang adil terhadap pendidikan bagi semua anak.

Andriani (2017) menjelaskan tentang kebijakan yang responsive terhadap penyandang disabilitas dan mampu menempatkan sebagai bagian dari keberagaman dalam sosial masyarakat. Kebijakan responsif yang inklusif dilaksanakan sebagai upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam interaksi sosial, penyandang disabilitas masih banyak mengalami persoalan eksklusi sosial

yaitu masih dianggap beban dan obyek, masih mendapatkan perlakuan diskriminasi, belum sepenuhnya dilibatkan dalam masyarakat, masih sering dipandang berbeda dengan orang lain, belum disetarakan dalam kesempatan, aksesibilitas belum mendukung serta identitas terhadap penyandang disabilitas belum di perhatikan dengan baik (Brief 2020).

Santoso et al (2013) membahas tentang kebijakan pengurangan risiko bencana inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten. Alasan-alasan di balik Pemerintah Kabupaten Klaten dalam merespon kebijakan ini dapat diketahui melalui *agenda setting* kebijakan. Menganalisis proses *agenda setting* kebijakan dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap perjalanan sebuah isu sampai akhirnya berada di tangan pemerintah. *Agenda setting* kebijakan merupakan tahapan yang krusial karena menyangkut dengan pendefinisian problem, pembuatan daftar proposal dan pemilihan kebijakan yang tepat. Kebijakan inklusi yang berpihak pada penyandang disabilitas lahir dari masalah - masalah yang muncul dalam manajemen penanggulangan bencana seperti halnya pelibatan penyandang disabilitas dan inklusi sosial dalam perencanaan penanggulangan bencana, penguatan aksesibilitas penyandang disabilitas, pelibatan seluruh gender dalam pengambilan keputusan, koordinasi yang belum maksimal antara Dinas/SKPD di pemerintahan serta belum maksimalnya pengembangan kapasitas bagi penyandang disabilitas serta pelibatan gender yang sesuai.

Muhaemin et al (2022) membahas tentang perspektif kebijakan publik dalam berbagai kegiatan pengurangan risiko bencana sesuai UU Penanggulangan Bencana meliputi pengenalan dan pemantauan risiko bencana; perencanaan partisipasif penanggulangan bencana; pengembangan budaya sadar bencana; peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; serta penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. Dengan demikian, pengurangan risiko bencana pada kelompok rentan merupakan upaya mengelola risiko bencana pada kelompok rentan termasuk disabilitas dengan meningkatkan ketangguhannya. Mustafa (2023) juga membahas terkait dengan penancangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai provinsi ramah disabilitas dengan pendekatan strategi komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Artikelnya membahas terkait metode komunikasi informal atau tersirat untuk mempengaruhi elit-elit pejabat utama pengambil keputusan agar lebih mengedepankan prinsip inklusivisme dikarenakannya kondisi pandemi covid-19. Pendekatan advokasi yang dilakukan tidak terpaku pada kasus kasus temporal dan

personal di masa pandemi COVID-10 sehingga keberhasilan advokasi bisa berdampak luas dan berkelanjutan.

Karya-karya terdahulu seperti di atas menjelaskan pentingnya kebijakan yang berpihak terhadap penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan perspektif gender serta inklusi sosial. Namun, mereka belum membahas pendekatan GEDSI dalam kebijakan penanggulangan bencana (Saputri 2022). Untuk mengisi kekosongan ini, artikel ini menjelaskan pendekatan GEDSI serta komitmen penting pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana dengan fokus pada Provinsi Bali. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Bali pada tahun awal pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali, yaitu dari 2008 hingga 2012, sebagian besar masih terfokus pada aktivitas pelaksanaan respon bencana yang pada umumnya mempersepsikan terhadap respon yang cepat, fisik yang kuat, serta fokus pada dampak yang ditimbulkan sehingga proses penanganan berjalan dengan baik. Namun, dengan perkembangan pengetahuan dalam dunia kebencanaan serta perkembangan penanggulangan bencana di Indonesia paradigma penanggulangan bencana khususnya di Provinsi Bali semakin hari semakin baik, di mana fokus pelaksanaan aktivitas bukan hanya di ruang lingkup respon bencana tetapi juga dalam aktivitas kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana, mitigasi serta ruang lingkup pasca bencana seperti rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Pendekatan GEDSI menjadi pendekatan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan khususnya mengarah pada standar pelayanan minimal yang telah di atur oleh pemerintah. Hal ini juga diperkuat dalam PP No. 42 Tahun 2020 tentang aksesibilitas terhadap permukiman, pelayanan publik dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas (Tabel 4). Untuk itu, pada artikel ini, tidak hanya hak penyandang disabilitas yang menjadi fokus, melainkan juga aspirasi atau pendapat dari setiap kalangan masyarakat baik wanita, orang tua dan anak-anak yang sangat penting dalam kebijakan penanggulangan bencana sehingga aktivitas yang dilaksanakan menjadi inklusif.

Pendekatan GEDSI pada Kebijakan Penanggulangan Bencana di Provinsi Bali

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan harmonis. Kesetaraan gender mengupayakan bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk

memberikan kontribusi pada aktivitas perlindungan sosial seperti penanggulangan bencana (Yaneri and Deswanti 2021). Bentuk keadilan dan kesetaraan gender dapat dilakukan dengan hal-hal berikut ini: (1) menerima dan memandang secara wajar perbedaan pada laki-laki dan perempuan karena adanya penghormatan pada perbedaan termasuk wujud dari ketidakadilan gender; (2) mendiskusikan bagaimana cara merombak struktur masyarakat yang membedakan peran dan relasi antara laki-laki dan perempuan, serta berupa menyeimbangkannya; (3) meneliti kemampuan dan bakat masing-masing warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat, memecahkan problem-problemnya dan mempersiapkan masa depannya; (4) memperjuangkan secara terus menerus hak asasi manusia, di mana gender merupakan salah satu dari bagiannya yang tak terpisahkan; (5) mengupayakan perkembangan dan penegakan demokrasi dan pemerintahan yang baik dalam semua institusi masyarakat, dengan melibatkan perempuan dalam semua levelnya; dan (6) pendidikan merupakan kunci bagi keadilan gender, karena pendidikan merupakan tempat masyarakat mentransfer norma-norma, pengetahuan, dan kemampuan mereka (Sardjunani 2013).

Berkaitan dengan pendekatan ini, pelibatan porsi perempuan dan laki-laki dalam seluruh rangkaian penanggulangan bencana di Provinsi Bali semakin terlihat, di mana BPBD Provinsi Bali sudah membuka peluang dalam pembentukan organisasi pengurangan risiko bencana pada tahun 2012. Organisasi ini yang menjadi cikal bakal pelibatan kelompok masyarakat atau perorangan yang konsen terhadap kebencanaan sehingga keterlibatan perempuan dapat mengimbangi keterlibatan laki-laki yang sebelumnya paling dominan dapat dilihat pada Tabel 2. Informasi yang diperoleh melalui wawancara menyatakan bahwa keikutsertaan multi pihak dalam penanggulangan bencana memberikan pengaruh besar terhadap aksi dalam pelaksanaan program kegiatan penanggulangan bencana. Pelibatan kelompok-kelompok yang konsen terhadap penanggulangan bencana di Bali memberikan warna yang berbeda dalam penanggulangan bencana.

Menurut Dunn (1995), pendekatan GEDSI dalam tahapan kebijakan penanggulangan bencana sebagai berikut. Pertama, tahapan penyusunan agenda. Dalam tahapan ini, issue dalam kebencanaan yang sering muncul adalah dampak bencana, di mana perempuan, anak-anak, lansia serta penyandang disabilitas menjadi prioritas obyek yang didukung dalam agenda publik dan issue tersebut berhak mendapat alokasi sumber daya publik. Dalam konteks penanggulangan bencana, pendekatan GEDSI dapat membantu mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan ketimpangan

sosial, ketidaksetaraan gender, dan eksklusi sosial dalam respons terhadap bencana. Keterlibatan multi pihak akan memberikan banyak masukan terhadap agenda publik tersebut. Informan kami menyampaikan beberapa kebutuhan khusus sebagai aktivitas program penanggulangan bencana di Provinsi Bali dengan mempertimbangkan pendekatan gender, disabilitas dan inklusi sosial. Pada Tabel 3 dapat diidentifikasi bahwa perempuan mungkin menghadapi risiko yang lebih tinggi akibat bencana atau bahwa kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak dan penyandang disabilitas mungkin mengalami kesulitan akses terhadap sumber daya dan layanan yang diperlukan. Pada tahapan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali menjadi koordinator dalam pengajuan agenda publik kepada Bappeda Provinsi Bali untuk dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pelibatan multi pihak yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali memberikan banyak alternatif kegiatan. Dengan pendekatan GEDSI, pelayanan pemerintah Provinsi Bali semakin baik sesuai dengan visi dan misinya.

Kedua, tahapan formulasi kebijakan. Dalam tahapan ini, pendekatan GEDSI dapat diintegrasikan dengan memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan mencerminkan prinsip kesetaraan gender, keadilan sosial, dan inklusi. Kapasitas organisasi menjadi pertimbangan penting di samping kumpulan masalah yang menjadi agenda publik, untuk itu para pembuat kebijakan di provinsi Bali harus dapat menyesuaikan urgensi dan kapasitas Provinsi Bali. Hal ini dapat dicapai dengan memasukkan perspektif gender dan keadilan dalam tujuan kebijakan, serta memastikan keterlibatan dan partisipasi kelompok yang rentan dalam proses perumusan kebijakan. Peranan BPBD Provinsi Bali melaksanakan konsultasi terhadap program-program kegiatan yang akan dilaksanakan pertahunnya agar pendekatan GEDSI menjadi berkelanjutan (Traustadóttir 2006). Pada saat wawancara dengan informan, program kegiatan yang dilaksanakan menitikberatkan pada pendekatan GEDSI seperti program kegiatan pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, hingga rehabilitasi dan dukungan bantuan.

Ketiga, tahapan legitimasi kebijakan. Tahapan ini memberikan otoritas pada pemangku kepentingan. Dalam hal ini, penentuan anggaran disesuaikan dengan kapasitas daerah serta urgensi pendekatan GEDSI dalam penanggulangan bencana.

Keempat, tahap implementasi kebijakan. Pada tahapan ini, keterlibatan multi pihak dalam pemerataan partisipasi antara laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas dalam mengimplementasikan

program kegiatan terkoordinir oleh BPBD Provinsi Bali. Pendekatan GEDSI tercermin pada seluruh kegiatan yang diimplementasikan.

Kelima, tahap evaluasi kebijakan, merupakan penilaian terhadap dampak dan efektivitas kebijakan yang diimplementasikan. Pendekatan GEDSI dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi untuk mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan kesetaraan gender, keadilan sosial, dan inklusi. Evaluasi juga harus mencakup pemantauan terhadap partisipasi kelompok yang rentan dalam implementasi kebijakan dan dampak kebijakan terhadap kesenjangan sosial.

Informan di BPBD Provinsi Bali menegaskan bahwa pendekatan GEDSI yang dilakukan dalam setiap rangkaian tahapan kebijakan terapkan pada seluruh program kegiatan dengan bantuan organisasi kemasyarakatan yang konsisten terhadap isu pendekatan GEDSI dalam penanggulangan bencana. Keterbatasan sumber daya menjadi faktor penentu pendekatan GEDSI dilakukan pada program kegiatan penanggulangan bencana. Pada akhir tahun 2019 hingga awal 2022, program BPBD Provinsi Bali mengalami penurunan dari segi biaya dan berdampak pada pelaksanaan kegiatan. Namun, dengan demikianlah pembelajaran tentang pentingnya kolaborasi multi pihak dalam melaksanakan program penanggulangan bencana menjadi sangat penting khususnya penerapan GEDSI. Hal ini sejalan dengan penelitian Darmanto and Fadillah (2010) yang menegaskan bahwa dengan usaha tersebut menunjukkan adanya kesadaran dari aparat pemerintah daerah tentang pentingnya semangat kerjasama (*esprit de corps*) antar aparat pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Dukungan kerjasama juga sangat diharapkan dari berbagai pihak agar semua pihak memiliki hak dan kewajiban pada tugas yang dilaksanakan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebencanaan

Pelayanan kebencanaan yang berkualitas dan responsif adalah kunci dalam mengurangi dampak buruk bencana dan memastikan pemulihan yang berkelanjutan bagi masyarakat terdampak. Dalam upaya mencapai tujuan ini, pendekatan GEDSI menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa pelayanan kebencanaan mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas bagi seluruh warga masyarakat, terlepas dari latar belakang sosial, gender, atau status (Brief 2020). Artikel ini menegaskan pentingnya pendekatan GEDSI dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan, serta strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menerapkan pendekatan ini secara efektif. Melalui pendekatan GEDSI yang holistik,

pelayanan kebencanaan dapat lebih responsif dan memberdayakan seluruh masyarakat untuk menghadapi tantangan bencana dengan lebih baik (Sinollah and Masruroh 2019).

Menerapkan pendekatan GEDSI dalam pelayanan kebencanaan memerlukan upaya kolaboratif dan strategi yang holistik. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan melalui pendekatan GEDSI.

Pertama, pengumpulan data dan analisis GEDSI, di mana dengan melakukan pengumpulan data yang komprehensif tentang profil dan kondisi kelompok marginal dalam situasi darurat. Data ini harus mencakup informasi tentang jumlah, lokasi, dan kondisi kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas. Analisis GEDSI dari data ini akan membantu memahami peran gender dan ketimpangan sosial dalam bencana serta menentukan intervensi yang tepat.

Kedua, pelibatan dan pemberdayaan kelompok marginal, di mana pendekatan GEDSI mendorong partisipasi aktif seluruh masyarakat, terutama kelompok marginal, dalam proses perencanaan, implementasi, dan pemantauan pelayanan kebencanaan. Kelompok marginal harus diberdayakan untuk berbicara tentang kebutuhan dan aspirasi mereka dan terlibat dalam mengambil keputusan tentang rencana dan program pelayanan kebencanaan. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok-kelompok advokasi dan mekanisme partisipatif lainnya.

Ketiga, kesadaran GEDSI bagi petugas bencana, di mana petugas bencana dan relawan yang terlibat dalam tanggap darurat harus dilatih tentang isu-isu GEDSI, termasuk sensitivitas gender, hak-hak anak, dan kebutuhan penyandang disabilitas. Pelatihan akan membantu meningkatkan kemampuan petugas dalam mengidentifikasi dan mengatasi kebutuhan khusus dari kelompok marginal selama tanggap darurat dan pemulihan. Para petugas juga harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang cara berkomunikasi dengan kelompok marginal dengan cara yang ramah dan terbuka, sehingga memberikan ruang bagi partisipasi aktif mereka (IFRC 2018).

Keempat, pengamanan dan perlindungan gender, di mana pendekatan GEDSI juga harus memperhatikan isu keselamatan dan keamanan perempuan dan anak-anak selama bencana. Dalam situasi bencana, perempuan dan anak-anak sering menjadi lebih rentan terhadap kekerasan fisik dan seksual. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah khusus untuk melindungi mereka dari ancaman ini dan memberikan akses yang aman ke

layanan perlindungan. Tempat penampungan harus dirancang untuk memisahkan perempuan dan anak-anak dari risiko kekerasan dan penyalahgunaan. Para petugas dan relawan harus dilatih tentang pendekatan sensitif gender dalam memberikan bantuan dan perlindungan bagi korban kekerasan selama bencana.

Kelima, integrasi GEDSI dalam perencanaan pemulihan pasca-bencana, di mana pendekatan GEDSI juga harus diintegrasikan dalam perencanaan dan implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Program pemulihan harus memastikan akses yang merata bagi semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal, dalam mengakses fasilitas publik, layanan dasar, dan program bantuan. Pemerintah harus memastikan bahwa perempuan dan kelompok marginal memiliki akses yang setara terhadap bantuan dan kompensasi untuk pemulihan ekonomi dan sosial mereka.

Keenam, kolaborasi dan kemitraan untuk menerapkan pendekatan GEDSI dalam pelayanan kebencanaan memerlukan kolaborasi dan kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga bantuan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Dengan bekerja sama, berbagai pihak dapat berbagi pengetahuan dan sumber daya untuk mengoptimalkan hasil dari program pelayanan kebencanaan yang inklusif (United Nations Development Programme 2018).

Ketujuh, peningkatan kapasitas masyarakat, di mana pendekatan GEDSI juga berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan mengurangi risiko yang dapat terjadi. Program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, simulasi, dan kampanye sosialisasi dapat membantu meningkatkan kesadaran akan risiko bencana dan bagaimana menghadapinya. Selain itu, masyarakat juga dapat diberdayakan untuk berperan aktif dalam perencanaan dan implementasi program pelayanan kebencanaan (UN Women 2021).

Peran Organisasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Peningkatan kesadaran tentang pentingnya GEDSI telah menggerakkan peran organisasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup bagi semua warga. Dalam konteks penanggulangan bencana, pendekatan yang berfokus pada GEDSI menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa respons bencana mencakup kebutuhan dan keberdayaan semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang rentan. Artikel ini akan mengeksplorasi peran organisasi masyarakat dalam pendekatan GEDSI dan

bagaimana fokus pada GEDSI meningkatkan upaya penanggulangan bencana. Pendekatan GEDSI dalam penanggulangan bencana menekankan pentingnya mempertimbangkan perbedaan gender, kemampuan, dan aksesibilitas dalam semua tahapan respons bencana. Pendekatan ini berfokus pada inklusi sosial, kesetaraan, dan hak-hak masyarakat terdampak.

Organisasi masyarakat berperan penting dalam mengadvokasi dan mengimplementasikan pendekatan GEDSI ini untuk memastikan bahwa bencana tidak menghancurkan ketimpangan sosial yang sudah ada. Peran organisasi masyarakat dalam pendekatan GEDSI adalah (1) Awareness dan edukasi, yaitu organisasi masyarakat berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang isu-isu GEDSI dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesetaraan dan inklusi sosial dalam konteks penanggulangan bencana; (2) Advokasi dan pengarah kebijakan, di mana organisasi masyarakat berperan sebagai pengawas dan pengkritik untuk memastikan bahwa kebijakan dan program penanggulangan bencana mencerminkan perspektif GEDSI dan mengatasi kesenjangan yang ada; (3) Pelibatan dan partisipasi, yaitu organisasi masyarakat berperan dalam memastikan partisipasi aktif dan efektif dari semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang biasanya terpinggirkan, dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program penanggulangan bencana; (4) Aksesibilitas dan keterlibatan di mana organisasi masyarakat berperan dalam memastikan aksesibilitas fisik dan komunikasi bagi orang dengan disabilitas, serta memfasilitasi keterlibatan mereka dalam proses penanggulangan bencana; dan (5) penguatan ekonomi di mana organisasi masyarakat dapat membantu memberdayakan perempuan dan kelompok marginal melalui pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan keterampilan dan usaha ekonomi yang berkelanjutan (Pahleviannur 2019).

Menerapkan pendekatan GEDSI dalam penanggulangan bencana adalah tugas yang kompleks dan penuh tantangan. Meskipun memiliki banyak manfaat, ada beberapa hambatan yang harus diatasi untuk mencapai respons bencana yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan pendekatan GEDSI dalam penanggulangan bencana adalah ketidakadilan gender dan stereotip yang mana ketidakadilan gender yang masih ada dalam masyarakat. Peran tradisional dan stereotip gender dapat menghambat partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana. Kadang-kadang, upaya partisipasi perempuan dianggap kurang signifikan atau diabaikan, meskipun mereka berperan sebagai agen perubahan dan pengetahuan lokal dalam menangani bencana. Kemudian

tantangan terhadap aksesibilitas dan keterbatasan fisik dalam mengakses layanan penanggulangan bencana yang ada. Infrastruktur fisik yang tidak ramah disabilitas dan kurangnya aksesibilitas menyulitkan partisipasi aktif mereka dalam proses respons bencana. Kurangnya kesadaran tentang kebutuhan orang dengan disabilitas juga dapat menyebabkan mereka diabaikan dalam perencanaan dan evaluasi bencana. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya organisasi masyarakat yang berfokus pada pendekatan GEDSI seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya. Pendekatan ini membutuhkan pendanaan dan waktu untuk melibatkan masyarakat secara aktif dan memastikan kesetaraan dalam penanggulangan bencana. Tantangan ini dapat mempengaruhi implementasi program secara efektif dan berkelanjutan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pendekatan GEDSI dalam penanggulangan bencana adalah hambatan lain (Parasasri and Nurhaeni 2021).

Pendidikan dan kampanye kesadaran diperlukan untuk mengatasi stereotip dan norma budaya yang membatasi partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam upaya penanggulangan bencana. Dalam banyak kasus, masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa peran dan kontribusi dari berbagai kelompok ini sangat penting dalam upaya penanggulangan bencana yang efektif. Kurangnya keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat rentan juga merupakan masalah dalam menerapkan pendekatan GEDSI. Beberapa kelompok mungkin merasa tidak terlibat atau diabaikan dalam proses pengambilan keputusan atau tidak memiliki platform untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka. Akibatnya, upaya penanggulangan bencana mungkin tidak mencerminkan kebutuhan dan perspektif mereka secara tepat. Koordinasi dan kerjasama yang efektif antara berbagai pihak juga menjadi tantangan. Organisasi masyarakat, pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk mengimplementasikan pendekatan GEDSI (Ina et al. 2023). Namun, terkadang ada kesulitan dalam mencapai sinergi yang efektif dan mengintegrasikan pendekatan GEDSI dalam rencana dan program penanggulangan bencana yang ada.

Upaya untuk mengatasi tantangan dalam menerapkan pendekatan GEDSI dalam penanggulangan bencana seperti kampanye kesadaran dan edukasi harus ditingkatkan untuk mempromosikan pentingnya pendekatan GEDSI dan mengatasi stereotip dan norma budaya yang membatasi partisipasi. Begitupula dengan penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelompok rentan harus diberdayakan dan diberikan pelatihan untuk menjadi lebih aktif dan efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan

program penanggulangan bencana. Dalam hal ini, keterlibatan dan partisipasi masyarakat rentan harus secara aktif dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan, sehingga kebutuhan dan aspirasi mereka dapat diakomodasi dengan lebih baik. Kerjasama antara berbagai pihak harus ditingkatkan untuk mencapai sinergi dan mendapatkan dukungan lebih dalam menerapkan pendekatan GEDSI (Arjani 2007). Terakhir, dengan pengawasan dan evaluasi yang ketat dan evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa pendekatan GEDSI diimplementasikan secara konsisten dan efektif. Menerapkan pendekatan GEDSI dalam penanggulangan bencana merupakan langkah penting dalam memastikan respons bencana yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Meskipun ada beberapa tantangan yang harus diatasi, upaya yang sinergis dan komprehensif dari berbagai pihak dapat membantu mengatasi hambatan dan mencapai penanggulangan bencana yang lebih efektif dan adil. Dengan meningkatkan kesadaran, penguatan kapasitas, dan partisipasi aktif masyarakat rentan, kita dapat menciptakan respons bencana yang lebih inklusif dan berdampak positif bagi semua anggota masyarakat Nandiini and Yunan (2022).

Penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Proses penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) melibatkan konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Langkah-langkahnya mencakup analisis kebutuhan masyarakat, identifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan pembuatan indikator kinerja yang relevan. Proses ini harus transparan dan partisipatif untuk memastikan bahwa SPM mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas. Implementasi SPM adalah tahap kritis dalam memastikan keberhasilan standar tersebut. Bagian ini akan membahas langkah-langkah yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPM ke dalam sistem pelayanan publik, termasuk pelatihan personel, penggunaan teknologi informasi, dan pengawasan yang efektif. Selain itu, juga akan dibahas pentingnya mekanisme umpan balik dari masyarakat untuk terus memperbaiki layanan berdasarkan evaluasi SPM. Manfaat Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi masyarakat berdampak pada pelayanan publik yang berkualitas berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Artikel ini akan menguraikan manfaat SPM, seperti peningkatan kepuasan pelanggan, efisiensi pelayanan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup. Selain itu, juga SPM dapat membantu menciptakan tata kelola yang baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Sphere Association (2018). Tantangan dalam implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) di antaranya adalah membahas isu-isu seperti keterbatasan anggaran, resistensi dari pihak internal, kompleksitas dalam mengukur kualitas pelayanan, dan perubahan kebijakan yang sering terjadi. Pemahaman mengenai tantangan ini penting untuk mengidentifikasi strategi yang tepat dalam mengatasi hambatan tersebut.

Kesimpulan

Artikel ini telah mendeskripsikan penerapan pendekatan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Bali. Integrasi pendekatan GEDSI dalam kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Bali telah meningkat. Pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan terkait telah mengadopsi kebijakan yang mengakui perbedaan gender, memperhatikan kebutuhan orang dengan disabilitas, dan mempromosikan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana. Penerapan pendekatan GEDSI dalam kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Bali telah menghasilkan dampak positif. Respons terhadap kebutuhan dan kerentanan kelompok yang rentan telah meningkat, partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan telah ditingkatkan, dan kesetaraan gender serta inklusi sosial secara keseluruhan telah ditingkatkan. Aktivitas penanggulangan bencana yang dilakukan menjadi lebih responsif dan relevan terhadap kebutuhan multi pihak.

Pelayanan kebencanaan melalui pendekatan GEDSI adalah langkah kritis untuk menciptakan tanggap darurat yang lebih inklusif dan memastikan perlindungan yang adil bagi seluruh warga masyarakat. Melalui pengumpulan data dan analisis GEDSI, pelibatan dan pemberdayaan kelompok marginal, kesadaran GEDSI bagi petugas bencana, pengamanan dan perlindungan gender, integrasi GEDSI dalam perencanaan pemulihan pasca-bencana, serta kolaborasi dan kemitraan, pelayanan kebencanaan dapat lebih responsif, inklusif, dan memberdayakan seluruh masyarakat untuk menghadapi tantangan bencana dengan lebih baik. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan terpadu, masyarakat dapat lebih siap dan responsif dalam menghadapi bencana dan memastikan keadilan serta kesetaraan selama periode pemulihan. Artikel ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam mengimplementasikan pendekatan GEDSI. Tantangan tersebut meliputi rendahnya kesadaran dan pemahaman, keterbatasan sumber daya, hambatan aksesibilitas, dan perubahan budaya dan norma yang diperlukan.

Berdasarkan temuan ini, dapat direkomendasikan perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman, peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, alokasi sumber daya yang memadai, dan upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi hambatan budaya dan norma yang menghambat inklusi. Pendekatan GEDSI bisa diterapkan di wilayah lain untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik dalam melindungi dan mendukung kelompok yang rentan selama bencana, serta menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali serta Universitas Bali Internasional yang telah memberikan kesempatan serta dukungan dalam penulisan artikel ini dan reviewer atas masukan dan komentar yang membangun.

Referensi

- Andriani, Nurul Saadah. 2017. "Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Manajemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional." *Palastren* 9(1):189–214.
- Arjani, Ni Luh. 2007. "Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Tantangan Global." 2:27–37.
- Darmanto, and Syarif Fadillah. 2010. "Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelayanan Publik." *Ilmu Administrasi Negara* 10(2):192–203.
- Dunn, William. 1995. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Frich, Ndaumanu. 2020. "Penyandang Disabilitas Mental." *Jurnal HAM* 11(1):131.
- Hunga, Arianti Ina Restiani and Emy Susanti. 2023. "Penguatan GEDSI pada Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam Memperkuat 'Merdeka Belajar Kampus Merdeka.'" (April). *Risalah Kebijakan: Peningkatan Perguruan Tinggi Menurut Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbasis GEDSI*.
- IFRC. 2018. "Minimum Standards for Protection, Gender and Inclusion in Emergencies." *IFRC Publication* 1–116.
- Kurzman, Charles, Willa Dong, Brandon Gorman, Karam Hwang, Renee Ryberg, and Batool Zaidi. 2019. "Women's Assessments of Gender Equality." *Socius* 5. doi: 10.1177/2378023119872387.

- Marzuki. 2017. "Studi Tentang Kesetaraan Gender dalam Berbagai Aspek." *Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek* 1(1):1–13.
- Muhaemin, Moh, Henky Mayaguezz, Anma Hari Kusuma, Oktora Susanti, Eko Efendi, Siti Hudaidah. 2022. "Peningkatan Kapasitas Kelompok Rentan Bencana (KRB) Melalui Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) Sebagai Upaya Mitigasi Bencana di Desa Trimulyo Kabupaten Pesawaran." *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung* 01(02):295–303.
- Mustafa, Dany. 2023. "Strategi Advokasi Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang." *Inklusi* 10(01):1–22.
- Nandiini, Adelia Riyan, and Zulfahmi Yasir Yunan. 2022. "Peran Pekerja Sosial dalam Memberikan Penanggulangan Bencana Alam Bagi Penyandang Disabilitas Peran Pekerja Sosial Dalam Memberikan Penanggulangan Bencana Alam Bagi Penyandang Disabilitas." *KAIS* 65–71.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal. 2019. "Edukasi Sadar Bencana Melalui Sosialisasi Kebencanaan Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Siswa Terhadap Mitigasi Bencana." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 29(1):49–55. doi: 10.23917/jpis.v29i1.8203.
- Parasasri, Ratu Riyaning Arum, and Ismi Dwi Astuti Nurhaeni. 2021. "Manajemen Bencana Responsif Gender: Kajian Inovasi Layanan Organisasi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta." *Wacana Publik* 1(1):62. doi: 10.20961/wp.v1i1.50891.
- Pemerintah Provinsi Bali. 2023. "Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali." *Pemerintah Provinsi Bali*.
- Pramudiana, Ika Devy. 2017. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Untuk ABK di Surabaya." *Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran* 5(1):1–9.
- Santoso, Anang Dwi, Irwan Noor, and Mochamad Chazienul Ulum. 2013. "Disabilitas dan Bencana (Studi Tentang Agenda Setting Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia)." *Adiministrasi Publik* 3(12):2033–39.
- Saputra, Nopriadi, and Riant Nugroho. 2021. "Good Governance pada Pelayanan Publik: Sebuah Usulan Model Pengembangan Berbasis Perilaku." *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)* 9(1):11–26. doi: 10.33701/jmsda.v9i1.1559.

-
- Saputri, Dwi Oktavallyan. 2022. "Fasilitas Pejalan Kaki Bagi Penyandang Disabilitas pada Jalur Pedestrian Lapangan Merdeka Kota Bengkulu." *Journal of Disability Studies: INKLUSI* 9(2):125–42.
- Sardjunani, Nina. 2013. "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan di Indonesia." *Education Sector Analytical And Capacity Development Partnership* (September):1–6.
- Sinollah, Sinollah, and Masruroh Masruroh. 2019. "Pengukuran Kualitas Pelayanan (Servqual-Parasuraman) dalam Membentuk Kepuasan Pelanggan Sehingga Tercipta Loyalitas Pelanggan." *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 4(1):45–64. doi: 10.36636/dialektika.v4i1.285.
- Sphere Association. 2018. *The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response*. Vol. 1.
- Traustadóttir, Rannveig. 2006. "Disability and Gender: Introduction to the Special Issue." *Scandinavian Journal of Disability Research* 8(2–3):81–84. doi: 10.1080/15017410600831341.
- UN Women. 2021. "Women ' S Resilience to Disasters." 2.
- United Nations Development Programme. 2018. "Gender Equality Strategy 2018-2021." *United Nations Development Programme* 28.
- Yaneri, Ahmad, and Arini Dwi Deswanti. 2021. "Analisis Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial pada Program Perlindungan Sosial: Studi Kasus Bantuan Sosial Tunai Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat." *Pekerjaan Sosial* 20(1):70–84. doi: 10.31595/peksos.v20i1.381.

| No | Kabupaten /Kota | Bulan | | | | Dominasi Bencana |
|----|---------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| | | 1 Janu ari - 25 Febr uari 2023 | 26 Febr uari - 25 Mare t 2023 | 26 Mare t - 30 April 2023 | 1-31 Mei 2023 | |
| 1 | Badung | 52 | 23 | 29 | 8 | Hidrometeorologi |
| 2 | Bangli | 16 | 3 | 1 | 1 | Hidrometeorologi |
| 3 | Buleleng | 68 | 35 | 16 | 6 | Hidrometeorologi |
| 4 | Denpasar | 19 | 2 | 11 | 7 | Kebakaran |
| 5 | Gianyar | 5 | 8 | 1 | 7 | Hidrometeorologi |
| 6 | Jembrana | 13 | 10 | 2 | 3 | Hidrometeorologi |
| 7 | Klungkung | 11 | 3 | 0 | 4 | Hidrometeorologi |
| 8 | Karangasem | 52 | 14 | 6 | 8 | Hidrometeorologi |
| 9 | Tabanan | 9 | 11 | 4 | 1 | Hidrometeorologi |
| | Jumlah | 245 | 109 | 70 | 45 | |
| | Dominasi Bencana | Hidr omet eorol ogi | Hidr omet eorol ogi | Hidr omet eorol ogi | Keba karan | |

Tabel 1
Data Jumlah Bencana di Provinsi Bali Januari-Mei 2023
Sumber : BPBD Provinsi Bali Tahun 2023

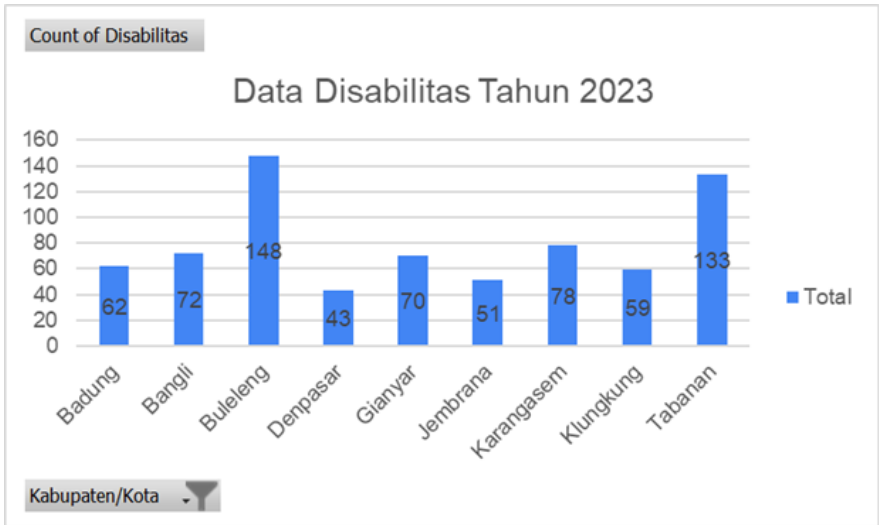
| No | Nama Organisasi | Jabaran | Persentase laki-laki (%) | Persentase Perempuan (%) |
|----|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | BPBD Provinsi Bali | Penanggulangan Bencana | 70 | 30 |
| 2 | Forum Pengurangan risiko bencana | Fokus terhadap Pengurangan Risiko Bencana | 75 | 25 |
| 3 | Forum Perguruan tinggi Pengurangan risiko bencana | Fokus terhadap Pengurangan Risiko Bencana | 50 | 50 |
| 4 | Forum Ikatan Ahli Bencana Indonesia Bali | Fokus terhadap Pengurangan Risiko Bencana | 50 | 50 |
| 5 | Forum Kemitraan Dunia Usaha Tangguh Bencana | Fokus terhadap Pengurangan Risiko Bencana | 60 | 40 |
| 6 | Forum Relawan Penanggulangan Bencana | Fokus terhadap Pengurangan Risiko Bencana | 75 | 25 |
| 7 | Aliansi perempuan tangguh bencana | Fokus terhadap Pengurangan Risiko Bencana, Inklusi Sosial, Kesetaraan gender | 0 | 100 |
| 8 | Aliansi Kepemudaan (Yowana Bali) | Fokus pada organisasi Kepemudaan Bali | 60 | 40 |
| 9 | Yayasan Gaya Dewata | Fokus pada inklusi sosial, Kesetaraan gender | 100 | 0 |
| 10 | Forum Wartawan Peduli Bencana | Fokus pada kehumasan, pemberitaan media dalam penanggulangan bencana | 50 | 50 |

Tabel 2
Komposisi Keterlibatan Perempuan dan Laki-Laki dalam
Penanggulangan Bencana di Bali

Sumber : Wawancara dan Data Sekunder

| Aspek | Permasalahan | Hal yang dapat dilakukan |
|-------|--|--|
| GEDSI | Akses terbatas bagi perempuan | Memastikan adanya penanganan bencana yang inklusif gender Mengikutsertakan perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan Memberikan akses informasi dan dukungan khusus untuk perempuan |
| | Tidak inklusif terhadap penyandang Disabilitas | Memastikan keberlanjutan aksesibilitas fisik dalam situasi bencana Melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan Menyediakan layanan khusus yang sesuai dengan kebutuhan Komunikasi yang inklusif dengan menyediakan informasi yang mudah dipahami, ramah terhadap keberagaman, memiliki metode alternatif untuk memastikan pesan-pesan penting tersampaikan dan mudah diakses oleh semua orang. |
| | Marginalisasi kelompok minoritas | Memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok minoritas Melibatkan kelompok minoritas dalam perencanaan dan implementasi Memprioritaskan keadilan sosial dan mengurangi disparitas Pendekatan berbasis hak, memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dan marginalisasi dalam penanggulangan bencana. Mengakui hak asasi manusia yang berkeadilan dan harus dihormati serta dilindungi |
| | Ketimpangan dalam distribusi bantuan | Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan Melibatkan masyarakat dalam penentuan prioritas bantuan Memperkuat kerja sama antar sektor untuk distribusi yang adil |

Tabel 3
Permasalahan GEDSI di Provinsi Bali
Sumber : Wawancara informan kunci



Tabel 4
Data Disabilitas di Provinsi Bali Tahun 2023
Sumber : Pengolahan data Dinas Sosial 2023

